

BAB II
DASAR-DASAR POLITIK LUAR NEGERI
AMERIKA SERIKAT DI FILIPINA

Sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat adalah Negara *super power* yang memiliki kemampuan di berbagai bidang terutama militernya, namun Tragedi 9/11 menyadarkan Amerika Serikat bahwa serangan teroris dapat terjadi kapan dan dimana saja. Seolah serangan tersebut terlihat menurunkan pamor bagi *super power* negaranya, Amerika Serikat sangat reaksioner terkait isu terorisme. Tentunya, Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politik luar negeri melalui berbagai bentuk hubungan kerjasama dengan sekutu-sekutu atau negara-negara lainnya. Politik luar negeri Amerika Serikat merupakan hasil dari formula kepentingan nasional sebagai kerangka untuk mencapai tujuan-tujuan.

Dalam kompetisi antar negara maupun dalam kanca internasional, Amerika Serikat memperkuat dari berbagai sisi-sisi dalam hal *power* seperti: perekonomian, pertahanan sebagai pengontrol wilayah-wilayah perbatasan negara, memperluas nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Namun pada realitasnya, dasar-dasar kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam penerapannya tidak pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan

nasional dan peluang dalam bentuk hubungan bilateral, melalui kerjasama regional, maupun dalam bentuk kerjasama internasional.

A. Fokus Utama Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Secara garis besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada akhirnya ada di tujuan nasional yaitu menunjukkan diri di kanca internasional sebagai negara *super power* yang menertibkan rambu-rambu dunia, pengontrol ekonomi, dominasi sumber daya alam, penyebaran ideologi liberalism, demokrasi, keamanan nasional dan menciptakan tatanan dunia baru serta *war on terrorism*.

. Dalam penerapan bentuk politik internasional Amerika Serikat memiliki dua level untuk dijadikan sebagai kebijakan signifikan yaitu liberalisme ekonomi dunia dan politiknya. Antara ideologi kapitalisme yang dibentuk untuk menginternasionalisasikan seperti Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Dapat dikatakan bahwa internasionalisasi ini dibutuhkan Amerika Serikat agar setiap pelaksanaan menjadi legal atau sah, walaupun pada kenyataannya hanya untuk kepentingannya semata.

Sedangkan pada bidang liberalisasi ekonomi, Amerika Serikat menerapkan kepentingan internasionalisasi dengan menciptakan suatu

tatanan ekonomi internasional melalui seperangkat organisasinya seperti *International Monetary Fund*, Bank Dunia, dan *World Trade Organization*. Hal yang merupakan agenda signifikan diterapkan Amerika Serikat adalah mengubah sistem mata uang dunia dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Pada tahun 1944, delegasi 44 negara yang mengadakan pertemuan di Bretton Woods menerima gagasan itu. Amerika Serikat dapat mempengaruhi atau bisa memaksa penggunaan dolar karena saat itu Amerika Serikat merupakan negara *super power* secara politik maupun militer di dunia. Sejak saat itu nilai dolar Amerika Serikat mendominasi perekonomian dunia.

Selain itu, perdagangan bebas juga merupakan program prioritas yang pembentukannya itu dipelopori oleh Amerika Serikat. Tujuan utama dari liberalisasi perdagangan ini adalah untuk membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk unggul maupun investasi dari negara-negara kapitalis. Sehingga, dari negara-negara yang berkembang ini akan selalu berada dibawah kontrol Amerika Serikat.¹

B. Peran Aktor Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya ada beberapa peranan penting oleh aktor, diantaranya:

¹ National Security Council, didapat dari: <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc>, Internet (diakses tanggal 23 September 2016)

1. Presiden berperan dalam penyelenggara politik luar negeri melalui departemen luar negeri dan menunjuk dan memberhentikan duta besar (atas persetujuan kongres)
2. Kongres berperan sebagai penunjuk duta besar dan menyetujui ataupun meratifikasi pembuatan kebijakan yang di buat oleh presiden.
3. Senat dan *house of representative* berperan dalam mengeluarkan resolusi ataupun menolaknya
4. Departemen berperan dalam penyelenggaraan administratif politik luar negeri Amerika Serikat.

Dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terdapat beberapa institusi pemerintahan yang memiliki peranan penting, diantaranya:

1. *Department of State*

- a. Sekretaris berfungsi sebagai penasihat Presiden terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat
- b. Berpartisipasi dalam atau mengarahkan perwakilan Amerika Serikat untuk konferensi internasional, organisasi, dan lembaga-lembaga,
- c. Melakukan negosiasi yang berhubungan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan kedutaan asing dan kantor konsulat

2. *Department of Defense*

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Korps Marinir didirikan pada tahun 1775, dalam persetujuan Revolusi Amerika. Departemen Perang didirikan pada 1789, dan sekarang menjadi Departemen Pertahanan. Satu tahun kemudian, pada 1790, *Coast Guard* (bagian dari *Homeland Security* dalam masa damai) didirikan. Hal ini diikuti oleh berdirinya Departemen Angkatan Laut pada tahun 1798. Keputusan untuk menyatukan berbagai layanan di bawah satu Departemen menyebabkan penciptaan Pembentukan Militer Nasional pada tahun 1947. Pembentukan ini akan menggantikan Departemen Perang, yang dikonversi ke Departemen Angkatan Darat. Pada tahun yang sama, Angkatan Udara Amerika Serikat didirikan diikuti dengan berdirinya Departemen Angkatan Udara. Akhirnya, tiga cabang dari militer, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ditempatkan di bawah kontrol langsung dari Sekretaris Pertahanan baru, yang dikonfirmasi oleh Senat.

Pada tahun 1949, amandemen Undang-Undang Keamanan Nasional lebih lanjut konsolidasi struktur pertahanan nasional dengan menarik tingkat kabinet status dari tiga sekretaris Layanan. Pendirian Militer Nasional kemudian berganti nama menjadi Departemen Pertahanan².

Menteri Pertahanan adalah penasihat kebijakan pertahanan utama kepada Presiden. Di bawah arahan dari Presiden, Sekretaris memegang

² About the Department of Defense, didapat dari: <https://www.defense.gov/about/#mission>, Internet (diakses tanggal 23 September 2016)

kewenangan, arah, dan kontrol atas Departemen Pertahanan. Wakil Sekretaris, pejabat tertinggi kedua peringkat di Departemen Pertahanan, didelegasikan kekuatan penuh dan memiliki wewenang untuk bertindak untuk Sekretaris dan untuk melaksanakan kekuasaan Sekretaris pada setiap dan semua hal yang Sekretaris berwenang untuk bertindak.

Departemen Pertahanan adalah lembaga pemerintah tertua dan terbesar Amerika. Dengan militer kita menelusuri akarnya kembali ke pra-Revolusioner. Departemen yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Leon E. Panetta, tidak hanya bertugas militer, tetapi juga menggunakan kekuatan sipil. Dengan lebih dari 1,4 juta pria dan wanita yang bertugas aktif, dan 718.000 personil sipil, kami adalah majikan terbesar di negara itu. 1,1 juta yang lain melayani di Garda Nasional dan pasukan Reserve. Lebih dari 2 juta pensiunan militer dan anggota keluarga mereka menerima bantuan.

Markas Departemen Pertahanan, Pentagon adalah salah satu bangunan kantor terbesar di dunia. Ini adalah dua kali ukuran Merchandise Mart di Chicago, dan tiga kali ruang lantai dari *Empire State Building* di New York. Dibangun selama awal Perang Dunia II, masih dianggap sebagai salah satu bangunan kantor yang paling efisien di dunia. Meskipun 17,5 mil dari koridor dibutuhkan hanya tujuh menit untuk berjalan antara dua titik di dalam gedung.

Keamanan nasional kami tergantung pada instalasi pertahanan dan fasilitas yang berada di tempat yang strategis, dengan kualitas yang tepat dan kapasitas untuk melindungi sumber daya nasional. Sumber daya tersebut tidak terlalu penting karena fokus Amerika adalah memerangi teroris yang merencanakan dan melakukan serangan ke negara kami. *Service* members militer dan warga sipil beroperasi di setiap zona waktu dan iklim. Departemen Pertahanan mengelola inventaris instalasi dan fasilitas untuk menjaga keamanan Amerika. Secara fisik bangunan Departemen sangat besar, terdiri lebih dari beberapa ratus ribu bangunan individu dan struktur yang terletak di lebih dari 5.000 lokasi yang berbeda. Ketika semua situs yang ditambahkan bersama-sama, Departemen Pertahanan memanfaatkan lebih dari 30 juta hektar tanah.

Untuk Missile Range besar Angkatan Darat White Sands di New Mexico menggunakan lebih dari 3,6 juta hektar, atau kompleks besar Angkatan Laut instalasi di Norfolk, Virginia dengan lebih dari 78.000 karyawan.

Misi dari Departemen Pertahanan adalah untuk menyediakan pasukan militer yang diperlukan untuk mencegah perang dan untuk melindungi keamanan negara. Kantor pusat departemen berada di Pentagon. Misi Defense.gov adalah untuk mendukung keseluruhan misi Departemen Pertahanan dengan memberikan informasi resmi, tepat waktu dan akurat

tentang kebijakan pertahanan, organisasi, fungsi dan operasi. Juga, Defense.gov adalah titik tunggal mulai bersatu untuk mencari informasi secara online militer.

Misi ini konsisten dengan Prinsip DoD Informasi, yang menggariskan kebijakan Departemen untuk memberikan informasi kepada anggota militer, warga sipil Departemen Pertahanan, anggota keluarga militer, publik Amerika, Kongres, dan media berita. Informasi yang Anda temukan di sini dibersihkan untuk dirilis publik sesuai dengan kebijakan Departemen Pertahanan yang berlaku.

C. National Security Council

Dewan Keamanan Nasional adalah forum utama Presiden untuk mempertimbangkan keamanan nasional dan masalah-masalah kebijakan luar negeri dengan penasehat keamanan nasional seniornya dan pejabat kabinet. Sejak dimulai di bawah Presiden Truman, fungsi Dewan telah memberi saran dan membantu Presiden dalam keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Dewan juga yang berfungsi sebagai lengan utama bagi Presiden untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan antara berbagai instansi pemerintah.

Dewan Keamanan Nasional diketuai oleh Presiden. Peserta reguler (baik hukum dan non-reguler) adalah Wakil Presiden, Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Asisten Presiden untuk Urusan

Keamanan Nasional. Ketua Gabungan Kepala Staf adalah penasihat militer hukum untuk Dewan, dan Direktur Intelijen Nasional adalah penasihat intelijen. Kepala Staf kepada Presiden, Penasihat kepada Presiden, dan Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi diundang untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Nasional. Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran diundang untuk menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka. Kepala departemen eksekutif lainnya dan lembaga, serta pejabat senior lainnya, diundang untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan Nasional disaat yang tepat.

Dewan Keamanan Nasional didirikan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional 1947 diubah dengan perubahan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1949. Kemudian pada tahun 1949, sebagai bagian dari Rencana Reorganisasi, Dewan ditempatkan di Kantor Eksekutif Presiden.³

D. Central Intelligence Agency (CIA)

Satu Badan. Satu Masyarakat. Sebuah Badan tak tertandingi dalam kemampuan inti, berfungsi sebagai satu tim, sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Komunitas Intelijen.

- ***Misi Central Intelligence Agency:***

Kami adalah baris pertama bangsa pertahanan.

³ National Security Council: <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc>, (diakses tanggal 25 September 2016)

Kami mencapai apa yang orang lain tidak bisa capai dan pergi ke mana orang lain tidak bisa pergi.

Kami melaksanakan misi kami dengan:

Mengumpulkan informasi yang mengungkapkan rencana, niat dan kemampuan musuh kita dan menyediakan dasar untuk keputusan dan tindakan.

Memproduksi analisis tepat waktu yang memberikan wawasan, peringatan dan kesempatan kepada Presiden dan pembuat keputusan untuk melindungi dan memajukan kepentingan Amerika.

Melakukan aksi rahasia atas petunjuk Presiden untuk mendahului ancaman atau mencapai tujuan kebijakan AS.

- ***Sejarah Central Intelligence Agency (CIA)***

Amerika Serikat telah melakukan kegiatan intelijen sejak zaman George Washington, tetapi sejak Perang Dunia II mereka telah dikoordinasikan pemerintah secara luas. Presiden William J. Donovan. Franklin D. Roosevelt menunjuk pengacara New York dan pahlawan perang, William J. Donovan, untuk menjadi Koordinator Informasi pertama, dan kemudian, setelah Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II, kepala *Office of Strategic Services* (OSS) pada tahun 1942. OSS - cikal bakal CIA - memiliki mandat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi strategis.

Setelah Perang Dunia II, OSS dihapuskan bersama dengan lembaga perang lainnya dan fungsinya dialihkan ke Departemen Negara dan Perang.

Tidak butuh waktu lama sebelum Presiden Truman mengakui kebutuhan akan sebuah organisasi, kecerdasan pasca perang terpusat. Untuk membuat kantor intelijen berfungsi penuh, Truman menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947 dan mendirikan CIA. *The National Security Act* dibebankan CIA dengan mengkoordinasikan kegiatan intelijen negara dan mengkorelasikan, mengevaluasi dan penyebarluasan intelijen yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.

Pada tanggal 17 Desember 2004, Presiden George W. Bush menandatangani Undang-Undang Reformasi Intelijen dan Terorisme Pencegahan yang melakukan restrukturisasi Komunitas Intelijen dengan meniadakan posisi Direktur *Central Intelligence* (DCI) dan Wakil Direktur *Central Intelligence* (DDCI) dan menciptakan posisi Direktur *Central Intelligence Agency* (D / CIA). UU ini juga menciptakan posisi Direktur *National Intelligence* (DNI), yang mengawasi Komunitas Intelijen dan *National Contra-Terrorisme Center* (NCTC).